



Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik Dan Ideologi Negara

Kamdani^{1*}, Alya Angelin², Abdul Iqbal³, Muhammad Al-Ghifari Hasibuan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Fakultas Ushuluddin dan Studi, Jurusan Ilmu Hadis.

kamdani4003243004@uinsu.ac.id¹, alyaangelin68@gmail.com², abduliqbal933@gmail.com³, alghifarihasibuan123@gmail.com⁴

Abstract. Pancasila, as the foundational ideology of the Republic of Indonesia, plays a crucial role as both an ideology and a system of political ethics. Pancasila is not just a legal and governance guideline, but also serves as a moral foundation in the nation's social and political life. This study aims to analyze Pancasila as a system of political ethics and national ideology applied in Indonesia's political, social, and national life. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, conducted through a literature review of various sources, including the constitution and official government documents. The findings of this study indicate that Pancasila functions as a moral guide in political decision-making, public policy, and interactions among the nation's components. The five principles of Pancasila, which include values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice, serve as ethical principles essential for building a just and civilized political life. Pancasila also plays a role in ensuring unity and social justice for all Indonesian citizens. However, there are various challenges in its implementation, such as the influence of globalization, a lack of public understanding of Pancasila, and a moral and ethical crisis that hinders the realization of Pancasila's values in national life. Therefore, efforts are needed to strengthen the understanding and implementation of Pancasila to achieve national goals more effectively.

Keywords: Pancasila, State Ideology, Political Ethics, Diversity

Abstrak. Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki peran penting sebagai ideologi dan sistem etika politik. Pancasila bukan hanya sekadar pedoman hukum dan tata pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara yang diterapkan dalam kehidupan politik, sosial, dan kebangsaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk konstitusi dan dokumen resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan politik, kebijakan publik, dan interaksi antar komponen bangsa. Lima sila Pancasila, yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi prinsip etika yang relevan untuk membangun kehidupan politik yang adil dan beradab. Pancasila juga berperan dalam menjamin persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti pengaruh globalisasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, serta krisis moral dan etika yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila agar tujuan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif.

Kata kunci: Pancasila, Ideologi Negara, Etika Politik, Keberagaman

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai ideologi dan sistem etika politik serta sebagai landasan konstitusional, yang berarti bahwa Pancasila mengatur tidak hanya urusan hukum dan tata pemerintahan, tetapi juga mengatur kehidupan moral dan sosial masyarakat Indonesia.

Pancasila, sebagai sistem etika, berfungsi sebagai landasan moral untuk setiap keputusan politik dan kebijakan yang dibuat oleh Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi untuk menyatukan berbagai macam kebudayaan di negara ini, menciptakan persatuan dalam keragaman, dan membangun identitas nasional. Ini akan membahas Pancasila sebagai ideologi politik dan sistem etika, serta bagaimana ia diterapkan dalam kehidupan politik, sosial, dan kebangsaan Indonesia.

Sebagai sistem etika politik, Pancasila memberikan landasan moral dan etis bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan politik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan dalam pengambilan

keputusan politik, pembuatan kebijakan publik, dan interaksi antar komponen bangsa.¹

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup yang mempersatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Pancasila menawarkan konsep kenegaraan yang inklusif dan toleran, memungkinkan keberagaman untuk hidup berdampingan dalam bingkai persatuan nasional.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, di mana data diperoleh melalui analisis berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer, yaitu konstitusi Republik Indonesia, seperti Pembukaan UUD 1945 dan dokumen resmi pemerintah, serta data sekunder yang berupa literatur ilmiah dan penelitian terdahulu terkait topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kajian literatur untuk memahami konsep-konsep utama serta penerapan Pancasila dalam konteks politik dan moral di Indonesia.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui tiga tahapan: identifikasi data untuk mengumpulkan informasi yang relevan, klasifikasi data berdasarkan tema utama, seperti peran Pancasila sebagai sistem etika politik, serta kendala penerapannya, dan terakhir, analisis data untuk menghubungkan informasi yang diperoleh dengan teori dan pandangan ahli. Penelitian ini dilakukan secara virtual melalui kajian literatur yang tersedia di perpustakaan dan jurnal daring

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dasar dan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip atau sila. Secara etimologi, kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sansekerta: "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti prinsip atau asas. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional yang menyatukan keberagaman Indonesia.³

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kelima sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, meliputi aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Pancasila juga berperan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, memberikan arahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi pemersatu bangsa dan memberi arah bagi perjuangan nasional untuk mencapai cita-cita bangsa.⁴

Dalam konteks global, Pancasila dipandang sebagai alternatif ideologi yang menawarkan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual, sosial, dan material. Pancasila mengakomodasi keberagaman Indonesia sambil tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Pengertian etika politik

Etika politik adalah bidang filsafat yang mempelajari bagaimana tindakan politik dan kebijakan publik diatur oleh prinsip-prinsip moral. Etika politik tidak hanya mempertimbangkan seberapa baik politik itu bekerja, tetapi juga bagaimana tindakan politik tersebut sesuai dengan standar moral seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan kesejahteraan umum. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa keputusan politik dan tindakan selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral serta memajukan kesejahteraan umum tanpa menyebabkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Dalam etika politik, pejabat dan pemimpin negara harus bertindak jujur dan jujur. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan berdampak pada masyarakat luas dan tetap tunduk pada rakyat yang mereka pimpin. Karena tidak ada standar moral yang jelas, etika politik sangat penting untuk menjaga tatanan politik yang adil karena kekuasaan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat umum.

C. Pancasila sebagai sistem etika pancasila

Kehidupan politik dan sosial Indonesia sangat bergantung pada Pancasila sebagai dasar negara dan

¹ Siswanto, *Pancasila sebagai Etika Politik di Indonesia* (Jurnal Filsafat, 27(1), 1995), h 123.

² Darmodiharjo, dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), h 142.

³ Kaelan, M.S, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta :Paradigma, 2013), h 32.

⁴ Darmodiharjo, dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.*(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995),h 56.

⁵ F. Budi Hardiman, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h 23.

ideologinya. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan ideologis dan filosofis, tetapi juga berfungsi sebagai sistem etika politik yang membantu orang dan lembaga mengelola negara. Tujuan etika politik Pancasila adalah untuk menciptakan keseimbangan antara moralitas dan kekuasaan sehingga keputusan politik mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat selain kepentingan kekuasaan.

1. Etika Politik dalam Perspektif Pancasila

Lima sila Pancasila dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip moral yang relevan untuk membangun kehidupan politik yang adil dan beradab, dan merupakan sistem etika politik yang berisi nilai-nilai moral yang harus menjadi pedoman untuk praktik politik.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa :

Dalam Sila pertama menyatakan bahwa nilai-nilai keagamaan harus menentukan kehidupan politik Indonesia. Etika politik menuntut pemimpin dan warga negara untuk menggabungkan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan integritas. Oleh karena itu, Pancasila mengajarkan etika politik bahwa moralitas yang tinggi, yang berasal dari keyakinan terhadap Tuhan, harus menjadi dasar kekuasaan politik.⁶

b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab :

Dalam sila kedua, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting. Prinsip-prinsip ini diajarkan dalam etika politik bahwa setiap tindakan dan kebijakan politik harus menghormati martabat manusia dan memperjuangkan keadilan tanpa diskriminasi untuk semua orang. Selain itu, prinsip ini mengingatkan bahwa kekuasaan politik harus digunakan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab daripada menindas.⁷

c. Persatuan Indonesia :

Sila ketiga menekankan betapa pentingnya persatuan nasional dalam politik. Politik yang etis adalah politik yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan kelompok atau golongan tertentu karena etika politik Pancasila mewajibkan para pemimpin dan politisi untuk menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa.⁸

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan :

Menurut Sila Keempat, keputusan politik harus dibuat melalui musyawarah dan representasi yang adil. Menurut etika politik ini, para pemimpin harus mengutamakan kebijaksanaan saat membuat keputusan dan selalu mempertimbangkan keinginan rakyat. Menurut Pancasila, politik yang etis berfokus pada kebijaksanaan kolektif dan proses pengambilan keputusan demokratis.⁹

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia :

Menurut sila kelima, politik yang etis berfokus pada keadilan sosial. Kebijakan politik harus berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi semua orang. Etika politik Pancasila menuntut para pemimpin untuk selalu mendukung keadilan sosial dalam setiap kebijakan mereka.

D. Pancasila Sebagai Doktrin Nasional

Sebagai doktrin nasional, Pancasila berfungsi untuk mengarahkan setiap kebijakan politik, sosial, dan ekonomi agar selalu berfokus pada kesejahteraan rakyat dan menjaga persatuan bangsa. Lima sila Pancasila berisi prinsip-prinsip yang mengarahkan bagaimana negara dan seluruh komponennya berperilaku untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu membentuk masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.¹⁰

1. Menjamin Persatuan

Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, disebutkan betapa pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa. Doktrin ini meminta semua warga negara, terutama para pemimpin, untuk selalu memprioritaskan kesatuan dan integrasi nasional. Dalam situasi ini, persatuan tidak hanya berarti kebersamaan di tempat yang sama itu juga berarti solidaritas sosial, keharmonisan dalam keberagaman, dan kerjasama antar suku, agama, dan golongan.¹¹

Dengan menekankan pentingnya kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok, Pancasila mencegah politik identitas yang dapat memecah belah bangsa.

Sebagai doktrin persatuan, Pancasila membantu orang Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keseragaman bukanlah tujuan dari persatuan ini; itu lebih tentang cara yang adil dan bijaksana untuk mengelola keberagaman. Pancasila bertujuan untuk mewujudkan persatuan yang dinamis dan inklusif di mana perbedaan dihargai dan dianggap sebagai kekuatan bangsa.

⁶ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta : Bina Aksara, 1981), h 35.

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h 42.

⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h 21.

⁹ Soedjatmoko, *Pembangunan dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h 67.

¹⁰ Notonagoro, *Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h 19.

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h 57.

2. Menjamin Keadilan sosial

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memastikan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. Menurut Pancasila, keadilan sosial mencakup aspek ekonomi selain keadilan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.¹²

Negara bertanggung jawab untuk menghilangkan ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi di antara masyarakat agar semua orang memiliki hak yang sama.

Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral bagi pemerintah untuk membuat kebijakan publik yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dalam konteks keadilan sosial. Distribusi sumber daya, akses ke layanan publik, dan jaminan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang rentan adalah semua contoh dari hal ini. Keadilan sosial tidak hanya didistribusikan; itu juga harus dilakukan dalam kerangka gotong royong dan solidaritas, di mana setiap anggota masyarakat berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹³

E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Politik Dan Moral Negara

Peran Pancasila sebagai ideologi, politik, dan moral negara Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan moral negara. Namun, ada banyak hambatan yang menghalangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan tantangan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk unsur-unsur budaya, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta perubahan yang terjadi di seluruh dunia yang memerlukan perubahan dalam penerapan Pancasila. Ini akan menguraikan masalah yang dihadapi saat menerapkan Pancasila, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya.

1. Globalisasi dan Pengaruh ideologi asing

Pengaruh globalisasi, yang membawa ideologi asing, merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi negara. Globalisasi memungkinkan akses ke berbagai ideologi dan perspektif dari luar, yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya, semangat gotong royong dan kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila bertentangan dengan ideologi liberalisme dan kapitalisme yang sering mengutamakan individualisme dan kepentingan pribadi. Selain itu, pengaruh ekstremisme menempatkan persatuan bangsa dalam bahaya.¹⁴

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila

Masyarakat, terutama generasi muda, mungkin kurang memahami Pancasila. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang Pancasila di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila sering kali terabaikan saat orang dan lembaga pemerintah membuat keputusan. Oleh karena itu, Pancasila tidak lagi dianggap sebagai garis besar yang harus diikuti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

3. Pengaruh Politik Praktis

Masyarakat, terutama generasi muda, mungkin kurang memahami Pancasila. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang Pancasila di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila sering kali terabaikan saat orang dan lembaga pemerintah membuat keputusan. Oleh karena itu, Pancasila tidak lagi dianggap sebagai garis besar yang harus diikuti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi membawa masuk berbagai ideologi dan nilai-nilai dari luar yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, yang lebih terpengaruh oleh budaya global.

5. Kepentingan Politik dan Kelompok

Dalam praktik politik, sering kali kepentingan kelompok atau partai politik lebih diutamakan dibandingkan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menyebabkan Pancasila tidak sepenuhnya dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.

6. Krisis Moral dan Etika

Krisis moral dan etika di berbagai lapisan masyarakat juga menjadi kendala dalam menerapkan Pancasila. Ketika nilai-nilai moral dan etika menurun, penerapan prinsip-prinsip Pancasila sebagai pedoman moral negara menjadi sulit.

¹² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h 32.

¹³ Soedjatmoko, *Pembangunan dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h 79.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h 44.

¹⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h 61

KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan politik, sosial, dan moral. Sebagai ideologi negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan bangsa, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Kelima sila ini menjadi pedoman dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila juga berfungsi sebagai sistem etika politik yang menjaga kesatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan memberikan arah dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis dan inklusif.

Namun, dalam penerapannya, Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pengaruh globalisasi dan masuknya ideologi asing menjadi salah satu kendala terbesar dalam mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai-nilai Pancasila membuat ajaran tersebut sering terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Politisasi nilai-nilai Pancasila oleh kepentingan kelompok atau partai politik tertentu juga menjadi masalah, karena sering kali mengabaikan kepentingan bersama demi keuntungan sesaat.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya serius dalam memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tentang Pancasila yang lebih mendalam, sosialisasi yang berkelanjutan, dan komitmen terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik menjadi langkah penting. Dengan demikian, Pancasila akan tetap relevan dan efektif sebagai pedoman moral dan ideologi negara yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, adil, dan bersatu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Kamdani, S.Ag, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berarti dalam penulisan jurnal ini. Bapak telah banyak memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian jurnal ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian. (1980). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kaelan. (2007). *Pancasila . Yogyakarta: Paradigma*.
- Notonagoro. (1995). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notonagoro. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soedjatmoko. (1995). *Pembangunan dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekarno. (2006). *Pidato Lahirya Pancasila*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno.